

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi(TI) telah menjadi komponen penting di dalam organisasi untuk membantu pelaksanaan proses kerjanya. Tetapi, keberadaan TI sendiri akan menimbulkan masalah baru jika pengelolaannya hanya dipandang hanya sebagai aktivitas penyediaan perangkat keras/lunak untuk memenuhi kebutuhan otomisasi proses kerja[1].

Salah satu contoh penerapan teknologi informasi adalah pada pemerintahan, yang dikenal dengan istilah *e-government*. *E-government* dapat memperbaiki proses bisnis pemerintahan[2]. Kota Bandung memiliki perencanaan untuk menerapkan *e-government*. Berdasarkan *masterplan* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kota Bandung, kota Bandung memiliki visi terwujudnya “*interactive e-Government Towards Leading Bandung and Smart City*”.

Ketersediaan data dan informasi yang terpadu menjadi salah satu masalah yang ada pada Lembaga Teknis Kota Bandung untuk penerapan *e-government*. Padahal, Ketersediaan ini dapat mendukung bisnis, dapat menyalurkan informasi antar dinas dan departemen, mengurangi beban kerja dan kesalahan pegawai, meningkatkan layanan pemerintahan secara efisien[4]. Pada salah satu Lembaga Teknis Kota Bandung yakni dinas perizinan, lamanya waktu pelayanan perizinan untuk masyarakat dikarenakan tidak adanya integrasi data dan informasi antara dinas perizinan dengan dinas lain yang terkait dengan jenis perizinan tersebut.

Untuk meningkatkan integrasi data dan informasi, Kota Bandung dalam Masterplan TIK nya mempunyai sasaran agar penerapan data *center* dapat berjalan 100% pada tahun 2018. Penerapan data *center* ini juga merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pelayanan publik karena terdapat perintah yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Pusat Data, setiap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data.

Untuk membantu penerapan *e-government* layanan satu atap juga diperlukan arsitektur enterprise yang baik. Ada banyak macam *framework* untuk membangun arsitektur enterprise, salah satunya adalah *Zachman Framework*. *Zachman Framework* dapat diaplikasikan secara efektif untuk mencapai layanan satu atap terpadu[4] pada dinas perizinan yang merupakan salah satu lembaga teknis di Kota Bandung.

Beberapa alasan tersebut menyatakan bahwa pengusulan arsitektur teknologi data *center* menggunakan pendekatan *Enterprise Architecture* dengan menggunakan *Zachman Framework* adalah solusi yang tepat untuk mewujudkan interoperabilitas kebutuhan data pada pemerintahan. Oleh karena itu dengan dasar dari uraian tersebut penelitian mencakup perencanaan tentang arsitektur teknologi data *center* untuk Lembaga Teknis Kota Bandung.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana mengusulkan arsitektur teknologi pada domain data *center* menggunakan *Zachman Framework* yang meningkatkan penerepan teknologi informasi pada Lembaga Teknis Kota Bandung?.

## **I.3. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini mengusulkan arsitektur teknologi domain data *center* yang sesuai untuk mendukung pengimplementasian *e-government* pada Lembaga Teknis Pemerintah Kota Bandung.

## **I.4. Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan rancangan arsitektur teknologi (domain arsitektur data *center*) berbasis *enterprise architecture* (EA) dengan menggunakan *Zachman Framework* pada Lembaga Teknis kota Bandung.

2. Meningkatkan integrasi data dan informasi antar Lembaga Teknis pemerintah kota Bandung.
3. Membantu mewujudkan target pengimplementasian data *center* pada tahun 2018.

### **I.5. Batasan Masalah**

Penulisan tugas akhir ini membatasi permasalahan supaya fokus pada permasalahan yang dihadapi, batasan penelitian antara lain:

1. Analisis dan perancangan arsitektur aplikasi.
2. Perancangan rencana implementasi dan testing.
3. Perancangan arsitektur keamanan pada data *center*.